

INFO MARITIM

NEWSLETTER, MEDIA INTERNAL DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

Edisi IV 2017



PELINDO 1
INDONESIA GATEWAY

ing Pelayanan Jasa Pemanduan
Selat Malaka - Selat Singapura

m, 10 April



**INDONESIA RESMI
PANDU SELAT MALAKA**

SUSUNAN PENGURUS

Penanggung Jawab

Direktur Jenderal Perhubungan Laut
Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut

Pengarah

Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut
Direktur Kepelabuhanan
Direktur Perkapalan dan Kelautan
Direktur Kenavigasian
Direktur Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai

Redaktur Pelaksana

Kepala Bagian Organisasi dan Hubungan Masyarakat

Redaktur

Kepala Sub Bagian Hubungan Masyarakat

Penyunting/Editor

Silo Darmono

Staf Redaksi

Presti Febriana
Putri Mayan Kalingi
Khairil Nur Wibowo
Anik Fianti

Desain Grafis & Fotografer

Tim Dersain Grafis
Indi Astono
Abdurahman

Sekretariat

Rustam Hidayat
Ibrahim Pilpala
Syahroni

Alamat Redaksi

Gedung Karya Lt. 15. Kementerian Perhubungan
Jl. Medan Merdeka Barat No.8. Jakarta 10110
☎ 021 – 3847118 ext. 4135
✉ djplkemenhub151@gmail.com
📱 @djplkemenhub151
📘 Ditjen Perhubungan Laut dan Fan Page
📷 djplkemenhub151
📺 djplkemenhub151

SEJARAH BARU MARITIM INDONESIA

Satu bulan belakangan ini ada dua peristiwa penting bagi dunia maritim Indonesia. Peristiwa pertama, kedatangan kapal raksasa milik perusahaan pelayaran Perancis, Compagnie Maritime d’Affretement – Compagnie Generali Maritime (CMA CGM) Othello, merapat di dermaga Jakarta International Container Terminal (JICT), Sabtu (22/4/2017). Kedua, diresmikannya pemanduan kapal di Selat Malaka dan Singapura.

Dua peristiwa besar tersebut merupakan sejarah baru maritim Indonesia yang merupakan pertanda keberhasilan Program Tol Laut yang menjadi tulang punggung Program Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia sebagaimana amanat Nawa Cita yang digagas oleh Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Pemanduan Selat Malaka dan Singapura tidak saja strategis bagi peningkatan keselamatan dan keamanan pelayaran, serta perlindungan lingkungan maritim, tetapi juga berperan penting bagi kedaulatan wilayah teritorial Indonesia di selat yang panjangnya sekitar 550 mil itu.

Untuk mendapat hak pemanduan di salah satu selat tersibuk dunia tersebut, Indonesia telah menempuh perjalanan panjang. Permasalahan ini selalu menjadi isu utama yang dibahas oleh tiga Negara Pantai (*The Littoral States*) yang terdiri dari negara Indonesia, Malaysia dan Singapura dalam Forum *Tripartite Technical Expert Group* (TTEG) dalam kurun satu dasawarsa ini.

Sedangkan kedatangan kapal raksasa CMA-CGM Othello, menjadi penanda bahwa pelabuhan-pelabuhan di Indonesia, khususnya Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta telah mampu melayani kapal-kapal berukuran raksasa dan yang membutuhkan kedalaman kolam pelabuhan di atas 14 meter.

Kapal petikemas yang memiliki kapasitas 8.238 TEUs dan panjang 334 meter itu pun menjadikan Pelabuhan Tanjung Priok semakin dengan dengan predikat pelabuhan Hub Internasional dan sebagai *Transshipment Port*. Sebab kapal CMA-CGM melakukan pelayaran langsung dari Indonesia menuju Los Angeles, Amerika Serikat.

Berita kedua prestasi Direktorat Jenderal Perhubungan Laut yang diakui langsung oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi inilah yang dapat dinikmati para pembaca dalam Buletin Info Maritim Edisi ke-4 ini. Selain itu, di edisi kali ini pun banyak informasi menarik lainnya yang dapat dinikmati para pembaca, seperti upaya Indonesia kembali menggalang dukungan untuk menjadi anggota International Maritime Organization (IMO). Selamat membaca! • Wisnu

Indonesia Galang Dukungan Untuk Kembali Jadi Anggota Imo

Halaman 8

Ditjen Hubla-AMSA Gelar Workshop Peningkatan Kualitas Pandu

Halaman 12

Tanjung Emas Siap Terapkan *Inaportnet*

Halaman 14

VTS Sorong dan Dumai Siap Terapkan PNBP

Halaman 16

INDONESIA RESMI PANDU SELAT MALAKA

Setelah sekitar 11 tahun melakukan diplomasi maraton dengan dua negara pantai yaitu Singapura dan Malaysia, Indonesia akhirnya bisa melakukan pelayanan jasa pemanduan terhadap kapal-kapal yang melintas di Selat Malaka dan Selat Singapura mulai hari Senin, 10 April 2017.

Peristiwa bersejarah ini diresmikan langsung oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi di Harbour Bay, Batam, Kepulauan Riau, dengan didampingi oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut A Tonny Budiono dan Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia I Bambang Eka Cahyana.

“Pada hari ini, Senin 10 April 2017 merupakan hari yang bersejarah bagi kita bangsa Indonesia. Dimana pada hari ini kita bersama-sama menyaksikan peristiwa penting yaitu resminya beroperasinya pemanduan di Perairan Selat Malaka dan Selat Singapura oleh Operator Pemanduan yang secara resmi ditunjuk Pemerintah Indonesia yaitu PT. Pelabuhan Indonesia I,” kata Menhub Budi Karya ketika memberikan sambutan pada acara seremonial pelayanan jasa pemanduan di Selat Malaka dan Singapura tersebut.

Proses beroperasinya pemanduan di Selat Malaka dan Selat Singapura ini merupakan hasil perjuangan yang panjang Pemerintah Indonesia melalui pembahasan antar Negara Pantai (*The Littoral States*) yang terdiri dari negara Indonesia, Malaysia dan Singapura dalam Forum *Tripartite Technical Expert Group* (TTEG).

Pembahasan itu mulai berhasil pada pertemuan Forum TTEG ke-41 di Jogjakarta yang ditindaklanjuti dengan pertemuan *Intersessional Meeting of The Working Group on*



Voluntary Pilotage Services in Straits of Malacca and Singapore yang diselenggarakan di Bandung pada Januari 2017 lalu.

Sejak itu, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Perhubungan secara resmi menyampaikan kesanggupan untuk melaksanakan pemanduan Selat Malaka dan Selat Singapura dengan target pelaksanaan pada tahun 2017.

“Pemerintah Singapura dan

Malaysia juga memberikan persetujuan ke Indonesia untuk melakukan pemanduan di Selat Malaka terlebih dahulu. Sebelumnya kedua negara itu menginginkan agar Indonesia mulai melakukan pemanduan pada tahun 2018 mendatang,” kata Menhub Budi.

Sedangkan pihak yang ditunjuk Kemenhub untuk melakukan pelayanan jasa pemanduan di perairan yang masuk dalam kategori Perairan



Pandu Luar Biasa (voluntary pilotage services) itu adalah PT Pelabuhan Indonesia I. Penugasan ini berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor. BX.428/PP 304 tanggal 25 November 2016 tentang Pemberian Izin Kepada PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) untuk melaksanakan Pelayanan Jasa Pemanduan dan Penundaan Kapal pada Perairan Pandu Luar Biasa di Selat Malaka dan Selat Singapura.

Direktorat Jenderal Perhubungan Laut juga telah mengeluarkan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Nomor. HK.103/2/4/DJPL-17 tentang Sistem dan Prosedur Pelayanan Jasa Pemanduan dan Penundaan Kapal pada Perairan Pandu Luar Biasa di Selat Malaka dan Selat Singapura. Juga mengeluarkan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor. PU.63/1/8/DJPL.07 tentang Penetapan Perairan Pandu Luar Biasa di Selat Malaka dan Selat Singapura.

Berdasarkan peraturan Dirjen



Hubla tersebut, pemerintah Indonesia akan melakukan pemanduan terhadap kapal yang melintas selat tersebut, mulai dari titik di Iyu Kecil ke Nongsa dengan jarak kurang lebih 48 *Nautical Miles*.

Rencana pemanduan tersebut juga telah dilaporkan pada pertemuan tiga negara yaitu Indonesia,

Malaysia, dan Singapura dalam acara *Intersessional Meeting of The Working Group on Voluntary Pilotage Services in Straits of Malacca and Singapore* yang diselenggarakan di Bandung pada tanggal 18 hingga 20 Januari 2017 lalu.

Dengan mulai dilaksanakannya pemanduan di Selat Malaka dan Se-

lat Singapura menjadikan Indonesia sebagai negara pertama yang siap dalam melaksanakan pemanduan atau pilotage di salah satu selat tersibuk di tersebut dari pada Singapura dan Malaysia.

Selama ini kapal-kapal yang melintas di Selat Malaka dan Selat Singapura tidak dilakukan pemanduan atau *pilotage*, tetapi masih bersifat *advisory*, yakni semacam pemberian masukan atau saran yang dilakukan oleh *Marine Advosiry* dari Singapura dan Malaysia. Jadi yang benar-benar pelayanan pemanduan atau *pilotage* memang baru dilakukan oleh Indonesia.

Pemanduan kapal Selat Malaka ini selain untuk meningkatkan keselamatan pelayaran dan perlindungan lingkungan maritim juga untuk menjaga kedaulatan wilayah teritorial Indonesia. Termasuk juga ada potensi pemasukan untuk negara melalui Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Pemanduan kapal ini dinilai sangat penting terutama terkait dengan aspek keselamatan pelayaran bagi kapal-kapal yang berlayar melintasi jalur tersebut. Terlebih, pemanduan di salah satu selat tersibuk di dunia ini merupakan amanat UU Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran, khususnya Pasal 198 ayat 1. Pemanduan ini juga sangat strategis untuk menjaga kedaulatan NKRI.

Selama ini, khusus di Selat Malaka pemerintah Indonesia belum melakukan pemanduan kapal. Padahal, di wilayah itu sangat strategis. Berdasarkan data dari yang dirilis laman resmi Kementerian



“
INDONESIA SIAP
MENYONGSONG ERA
KEMANDIRIAN MARITIM
YANG MENJADI SALAH
SATU BAGIAN DARI
PROGRAM BESAR
MENJADIKAN INDONESIA
SEBAGAI POROS MARITIM
DUNIA.

Perhubungan, dephub.go.id, tidak kurang dari 90 ribu kapal berbagai ukuran melintas di selat yang panjangnya sekitar 550 mil itu per tahun atau 7.500 kapal per bulan.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi juga mengungkapkan

rasa bangga atas pencapaian Kementerian Perhubungan, khususnya Direktorat Jenderal Perhubungan Laut atas tercapainya *Key Performance Indicator* (KPI). KPI yang dimaksud oleh Menhub terkait dengan dua hal, yakni pertama, kapal besar berkapasitas 8500 TEUs bisa sandar di Pelabuhan Tanjung Priok pada Minggu (9/4/2017). Kedua, *launching* pemanduan kapal di Selat Malaka dan Selat Singapura pada Senin (10/4/2017).

Capaian kedua kinerja tersebut semakin menunjukkan bahwa Indonesia siap menyongsong era kemandirian maritim yang menjadi salah satu bagian dari program besar menjadikan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia sesuai semangat Nawa Cita yang digagas oleh Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. • Sito





JELANG ANGKUTAN LEBARAN, PEMERIKSAAN KELAIKLAUTAN KAPAL DIPERKETAT



pang dalam rangka meningkatkan keselamatan pelayaran selama masa Angkutan Lebaran 2017/1438 H dilakukan mulai 17 April hingga 30 Juni 2017.

Untuk mendukung hal tersebut, Dirjen Tonny mengeluarkan Instruksi Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor: UM.008/32/6/DJPL-17 tanggal 17 April 2017 tentang Pemeriksaan Kelaiklautan Kapal Penumpang Dalam Rangka Angkutan Laut Lebaran Tahun 2017. Instruksi tersebut ditujukan kepada para Kepala Kantor Kesyahbandaran Utama, Kepala Kantor Pelabuhan Batam, para Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I – V dan Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas I – III.

Instruksi Dirjen dimaksud dikeluarkan untuk meningkatkan kelancaran, keselamatan, keamanan dan kenyamanan transportasi khususnya di sektor Perhubungan Laut dalam rangka angkutan laut Lebaran tahun 2017. Instruksi Dirjen dimaksud juga dikeluarkan untuk menyeragamkan dalam pelaksanaan pemeriksaan kelaiklautan kapal penumpang dan mekanisme pelaporan sesuai ketentuan.

Pengujian kelaiklautan kapal penumpang akan dilaksanakan di 16 pelabuhan dengan lonjakan penumpang yang tinggi pada masa

Kementerian Perhubungan Cq. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut telah mulai memperketat pemeriksaan kelaiklautan kapal penumpang di sejumlah pelabuhan di Indonesia. Langkah ini sebagai antisipasi Menjelang masa angkutan laut Lebaran tahun 2017 yang akan dimulai 10 Juni 2017 (H-15) sampai dengan 11 Juli 2017 (H+15).

Direktur Jenderal Perhubungan Laut, A. Tonny Budiono di Jakarta (25/4/2017) menyampaikan bahwa pemeriksaan kelaiklautan kapal penumpang merupakan tugas rutin yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut setiap



waktu dan bukan hanya dilakukan menjelang Lebaran atau hari raya lainnya.

“Pemeriksaan kelaiklautan kapal rutin kami lakukan setiap saat secara periodik namun menjelang Lebaran pemeriksaan tersebut dilakukan lebih ketat,” ujar Tonny.

Uji kelaiklautan kapal penum-



lakukan pula kegiatan pemantauan dan pengendalian lalu lintas dan angkutan laut melalui Posko Angkutan Laut Lebaran tahun 2017/1438 H yang merupakan bagian dari Posko Angkutan Lebaran Terpadu Kementerian Perhubungan.

“Direktorat Jenderal Perhubungan Laut juga akan memonitor 52 pelabuhan pantau selama musim angkutan laut Lebaran 2017,” ujar Dirjen Tonny.

Kementerian Perhubungan memprediksikan jumlah penumpang dalam angkutan Lebaran tahun 2017 mengalami kenaikan sebesar 4.85% dari tahun sebelumnya sekitar 18 juta orang menjadi 19 juta orang.

Dirjen Tonny memprediksi peningkatan jumlah penumpang angkutan laut disesuaikan dengan realisasi 2016. Biasanya tidak jauh dari 3 persen. Tahun lalu realisasi sebesar 930 ribu dan tahun ini 960 ribu penumpang.

“Prediksi kami masih kecil peningkatannya, ada pilihan moda lain dengan pelayanan lebih cepat sampai tujuan seperti pesawat dan kereta,” kata Dirjen Tonny.

Namun begitu, Ditjen Hubla tetap akan mengoptimalkan angkutan laut mudik Lebaran 2017 dengan memanfaatkan operasional kapal-kapal besar agar masyarakat pemudik memiliki alternative moda transportasi untuk berlebaran di kampung halaman. Pemudik tidak tertumpu pada moda transportasi darat, kereta api, dan udara. Apalagi moda transportasi laut lebih aman karena setiap tahun selalu *zero accident*. ● Presti

angkutan lebaran, yaitu pelabuhan Batam, Tanjung Perak, Balikpapan/Samarinda, Pare-Pare, Ambon, Nunukan, Banten, Sibolga, Kendari, Sorong, Tanjung Emas, Sampit, Makassar, Tarakan, Lembar, dan Bau-Bau.

Hasil pengujian kelaiklautan kapal, termasuk di dalamnya nomor registrasi kapal, nama Marine Inspector penanggung jawab, tanggal pengujian, serta catatan pemeriksaan yang harus ditindaklanjuti kemudian wajib dilaporkan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut.

Di samping itu, Syahbandar juga diwajibkan untuk melaporkan kesiapan sarana angkutan laut Lebaran 2017 serta melakukan monitoring secara terus menerus terhadap kapal-kapal penumpang sampai dengan batas akhir posko angkutan Lebaran 2017.

Secara khusus, Dirjen Tonny juga menugaskan Direktur Perka-



palan dan Kepelautan untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Instruksi Dirjen tersebut.

Sedangkan dari aspek kesiapan armada selama masa penyelenggaraan Angkutan Laut Lebaran tahun 2017/1438, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut akan menyiapkan armada kapal laut sebanyak 1.278 unit kapal yang terdiri dari 26 kapal Pelni, 28 kapal ro-ro swasta, 74 kapal swasta, dan 1.049 kapal swasta jarak dekat, dan 96 kapal perintis.

Bersamaan dengan penyelenggaraan angkutan laut lebaran ini di-



INDONESIA GALANG DUKUNGAN UNTUK KEMBALI JADI ANGGOTA IMO

Kementerian Perhubungan menggelar resepsi diplomatik guna menggalang dukungan dalam pencalonan sebagai anggota Dewan International Maritime Organization (IMO) kategori C periode 2018-2019 di Jakarta, Senin (3/4/2017). Pemilihannya sendiri akan dilaksanakan dalam sidang Majelis IMO Ke-30 di London pada 27 November hingga 6 Desember 2017.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengundang para Duta Besar dan Pejabat Perwakilan Negara Sahabat yang ada di Jakarta, serta para *stake holder* transportasi laut.

Komitmen Indonesia mendukung perkembangan dunia maritim semakin kuat setelah Presiden Joko Widodo menekankan pentingnya keanggotaan Indonesia dalam IMO serta menggagas program Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia.

Indonesia memang sejak dulu telah terkenal sebagai Negara maritim. Bahkan sudah sejak dulu disadari bahwa lautan adalah kunci bagi kesejahteraan negeri.

"Laut bagi kami bukan sekadar komitmen, namun sudah menjadi gairah hidup," ujar Menhub Budi pada kesempatan tersebut.

Menjadi Anggota Dewan IMO, dapat memberikan Indonesia keis-

timewaan untuk mewujudkan visi pemerintahan Presiden Joko Widodo ke dalam tindakan, yang akan membawa manfaat tidak hanya bagi Indonesia, namun juga bagi semua negara di dunia.

Keuntungan bagi Indonesia, membuat maritim bisa menjadi solusi bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Perwujudannya dapat melalui tol laut, peningkatan pelayaran rakyat dan pengembangan angkutan RoRo.

Sedangkan keuntungan bagi eksternal, ada improvisasi menjadikan pelabuhan hub internasional, seperti Pelabuhan Tanjung Priok (Jakarta), Bitung (Sulawesi Utara), dan

Kuala Tanjung (Sumatera Utara).

Keuntungan lainnya adalah kesempatan Indonesia untuk mengelola pemanduan di perairan Selat Malaka dan Singapura.

Dirjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan A Tonny Budiono menyebutkan, Indonesia telah 20 kali terpilih menjadi anggota Dewan IMO, sejak secara resmi menjadi anggota pada 18 Januari 1961.

Pada pemilihan anggota Dewan periode 2016-2017 dalam Sidang Majelis IMO ke-29 yang diadakan di London pada tahun 2015, Indonesia berhasil memperoleh 127 suara dan berada di peringkat ke-9 dari 20 negara anggota Dewan IMO di Kategori "C".

"*Diplomatic Reception* ini rencananya akan diselenggarakan sebanyak dua kali di Jakarta, yakni April dan Oktober serta satu kali di London pada November 2017," ungkap Tonny.

Penyelenggaraan *Diplomatic Reception* ini merupakan suatu kegiatan nasional sebagai salah satu upaya pendekatan kepada negara-negara lain untuk memberikan dukungannya pada sidang IMO mendatang. Penggalangan dukungan ini sangat penting, mengingat saat ini terdapat empat negara anggota, yang baru akan mencalonkan diri sebagai Anggota Dewan IMO Kategori C. Keempat negara tersebut adalah Arab Saudi, Iran, Jamaica, dan Polandia.

Pada sidang November-Desember 2017 nanti, minimal Indonesia harus memperoleh suara hingga 120 agar bisa kembali menjadi anggota Dewan IMO kategori C.

Tonny menambahkan, para Tim Lobi telah dibagi tugas untuk secara aktif melakukan lobi kepada para tamu perwakilan negara sahabat yang hadir guna mendapatkan dukungan suara dari negara-negara anggota IMO pada saat Sidang Majelis IMO mendatang.

Salah satunya Atase Perhubungan di London yang juga perwakilan Indonesia di IMO. Simson Sinaga melakukan lobi kepada Si-

ngapura. Antusias dan support Singapura dinilai Simson sangat tinggi.

"Hal itu mengingat hubungan Indonesia dan Singapura sangat baik," kata Simson.

Indonesia telah menjadi Anggota Dewan IMO sejak tahun 1973 atau telah 20 kali terpilih. Dengan kembali menjadi anggota Dewan, maka menunjukkan pengakuan dunia terhadap eksistensi Indonesia yang turut menentukan kebijakan sektor transportasi laut dunia.

Perlu diketahui, IMO merupakan badan khusus Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) yang didirikan pada tahun 1948, bertanggung jawab pada isu-isu keselamatan dan keamanan pelayaran serta pencegahan terhadap polusi laut.

Sejak keberadaannya, IMO saat ini beranggotakan 172 negara termasuk Indonesia serta tiga associate members dengan kantor pusat berbasis di Inggris yaitu Dewan IMO Kategori A, B, dan C.

Untuk periode 2016-2017, Dewan IMO Kategori A terdiri dari 10 negara yang mewakili armada pelayaran niaga internasional terbesar dan sebagai penyedia angkutan laut internasional terbesar yaitu Cina, Yunani, Italia, Jepang, Norwegia, Panama, Republic of Korea, Russia, Inggris dan Amerika Serikat.

Anggota Dewan IMO kategori B terdiri dari 10 negara yang mewakili kepentingan terbesar dalam penyelenggara jasa perdagangan lewat laut/*International Seaborne Trade* yaitu Argentina, Bangladesh, Brazil, Canada, Perancis, Jerman, India, Belanda, Spanyol dan Swedia.

Terakhir adalah anggota Dewan IMO kategori C merupakan negara yang mempunyai kepentingan khusus dalam angkutan laut dan mencerminkan pembagian perwakilan yang adil secara geografis yaitu Australia, Bahama, Belgia, Chili, Cyprus, Denmark, Mesir, Indonesia, Kenya, Liberia, Malaysia, Malta, Mexico, Moroko, Peru, Filipina, Singapura, Afrika Selatan, Thailand dan Turki. • **Mayan**



KEDATANGAN KAPAL RAKSASA CMA-CGM, TONGGAK BARU SEJARAH PELAYARAN INDONESIA

Kedatangan kapal raksasa *Compagnie Maritime d’Affretement – Compagnie Generali Maritime* (CMA CGM) Otello berkapasitas 8.238 teus ke Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta pada Minggu (23/4/2017), merupakan sejarah baru bagi angkutan pelayaran Indonesia, khususnya angkutan kargo yang selama ini tidak pernah terwujud.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan hal itu saat menyambut kedatangan kapal raksasa asal Perancis itu bersama sama dengan Dirut PT Pelindo II Elvyn G Masassya dan Direktur Jenderal Perhubungan Laut A. Tonny Budiono di Dermaga Jakarta International Container Terminal (JICT) Jakarta.

“Ini menandakan bahwa apa yang sebelumnya seperti tidak mungkin dilakukan menjadi mungkin. Indonesia sudah mampu melayani kapal-kapal berukuran raksasa dengan kapasi-

tas di atas 10.000 teus yang membutuhkan kedalaman air 14 meter,” kata Menhub Budi.

Pelayaran CMA-CGM yang langsung dari Jakarta ke Amerika Serikat ini diyakini dapat meningkatkan efisiensi biaya logistik antara 20% hingga 30%. Waktu pengiriman pun bisa lebih cepat hingga 10 hari.

“Dengan begitu, akan membuat efisiensi logistik Indonesia menjadi lebih baik,” kata Menhub Budi.

Menhub berpesan kepada PT Pelindo II untuk meningkatkan efisiensi dengan menetapkan biaya yang lebih kompetitif.

“Sekarang Pelabuhan Tanjung Priok sudah melayani 6 juta Teus dan saya targetkan 2 tahun lagi, PT Pelindo II dapat melayani kargo sebanyak 12 juta Teus,” katanya.

Pada kesempatan itu, Menhub Budi meminta agar PT Pelindo I hingga Pelindo IV mengkonsolidasikan angkutan kargo tujuan ekspornya untuk diangkut

melalui Pelabuhan Tanjung Priok. Konsolidasi angkutan tersebut untuk memenuhi tingkat keterisian kapal yang selama ini menjadi salah satu penyebab kapal-kapal besar enggan datang ke Indonesia.

“Dengan tingkat keterisian yang lebih baik, diharapkan kapal-kapal peti kemas raksasa mau datang ke Indonesia dan menjadikan Pelabuhan Tanjung Priok sebagai *transshipment* ke luar negeri,” katanya.

Berbeda dengan kedatangan kapal yang merupakan trial call pada tgl 9 April 2017 yang juga dihadiri oleh Menteri Perhubungan (CMA CGM TITUS) dan 16 April 2017 (CMA CGM TANCREDI), kedatangan kapal kali ini menandai dimulainya pelayanan kapal yang terjadwal oleh kapal-kapal CMA CGM dari dan ke Terminal JICT, Tanjung Priok.



Tanjung Priok Siap Jadi *Transshipment Port*

Dirut PT Pelindo II Elvyn G Masassya menyatakan bahwa dengan kedatangan kapal raksasa tersebut merupakan bukti bahwa Pelabuhan Tanjung Priok telah mampu melayani kapal-kapal berukuran super besar yang membutuhkan kedalaman hingga 14 meter lebih. Bahkan Pelabuhan Tanjung Priok telah siap menjadi *transshipment port* di Indonesia.

Elvyn juga berharap dengan kedatangan kapal tersebut, kargo-kargo di sekitar Pulau Jawa bisa ke Pelabuhan Tanjung Priok dahulu baru ke negara tujuan dari pada ke Singapura.

“Nanti tidak perlu lagi *transshipment* di Singapura atau Malaysia. Dengan begitu, biaya logistik akan semakin kompetitif sehingga Pelabuhan Tanjung Priok dapat menjadi *transshipment* di Asia Tenggara,” kata Elvyn.

Selain itu, biaya logistik Indonesia tidak lagi mahal. Sehingga mampu meningkatkan daya saing produk-produk Indonesia di luar negeri.

Sementara itu, Senior Vice President CMA CGM Asia, Jean-Yves Duval menyatakan sangat senang dapat membantu Indonesia untuk melakukan lebih banyak ekspor ke Amerika Serikat.

“Indonesia merupakan pengembangan strategis di Asia Tenggara dan mungkin membuka peluang ekspor ke jaringan kami yaitu ke Afrika dan Amerika Latin,” ujar Duval.

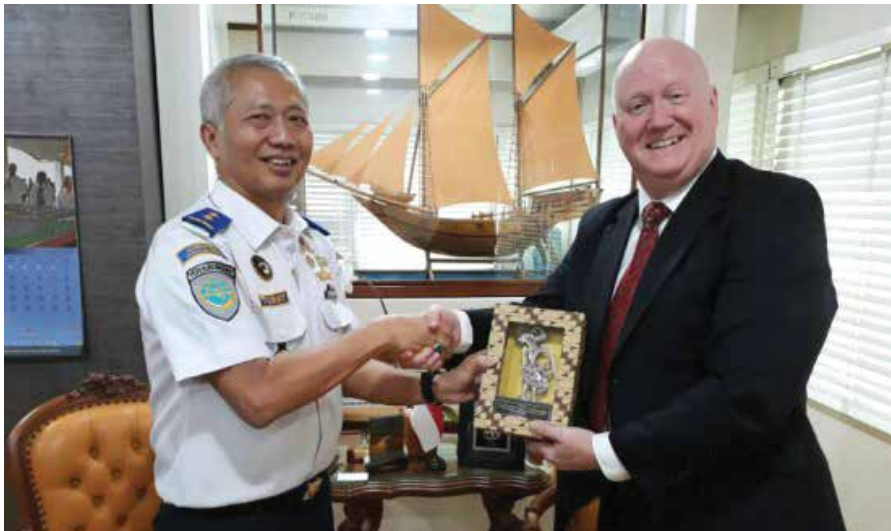
Tercatat total bongkar muat selama tiga pekan ini terus meningkat dengan angka rata-rata 2.100 Teus.

Kapal kontainer ini untuk layanan *Java South East Asia Express Services/Java SEA Express Services* atau disingkat *JAX Services* dan *Pendulum Loop I (PEI)*. Masing-masing dioperasikan oleh CMA CGM dan APL yang merupakan maskapai pelayaran dari CMA CGM Group.

Pelayaran ini akan melayani rute Tanjung Priok ke *West Coast (LA & Oakland)* Amerika Serikat dengan sistem *weekly call* atau sandar minggu secara rutin. ● Silo



DITJEN HUBLA-AMSA GELAR *WORKSHOP* PENINGKATAN KUALITAS PANDU



Ditjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan bersama *Australian Maritime Safety Administration* (AMSA) menggelar *Workshop Pilotage Management*. Kegiatan ini dalam kerangka program ITSAP (*Indonesia Transport Safety Assistance Package*) yang bertujuan untuk terus meningkatkan manajemen pemanduan untuk keselamatan pelayaran khususnya di wilayah pelabuhan dan beberapa selat di Indonesia.

“Kami menyadari bahwa Indonesia memerlukan petugas pandu yang begitu besar yang harus ditunjang dengan pengembangan mutu manajemen guna meningkatkan

pelayanan pemanduan,” ujar Dirjen Perhubungan Laut A. Tonny Budiono di sela pembukaan Workshop di Jakarta, Selasa (4/4/2017).

Saat ini Indonesia telah memiliki lebih dari 109 area pemanduan akan terus meningkat jumlahnya dari waktu ke waktu. Sejak tahun 1971 hingga tahun 2016, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut telah mensertifikasi sekitar 1.369 pandu dan sebanyak 74 siswa pandu saat ini tengah mengikuti program Diklat Pandu Tingkat II.

Dirjen Tonny berharap *Workshop* dapat memberikan manfaat bagi peningkatan pelayanan pemanduan. Pada kesempatan itu juga

disampaikan terima kasih kepada AMSA yang telah mendukung kegiatan tersebut.

Kerja sama itu sendiri meliputi bidang *capacity building* terkait *Non Convention Vessel Standard* (NCVS), *IMDG Code Training*, *PSC Training for Officer*, *VTS Operator Training*, *Pilotage Management* dan sebagainya.

“Indonesia, khususnya Ditjen Perhubungan Laut, sangat menghargai dan mengapresiasi dukungan dan bantuan Australia dalam mengembangkan kapasitas dan standar petugas kita melalui program-program ITSAP yang telah berjalan sejak tahun 2009 hingga 2015,” ujarnya.

Pengembangan kapasitas Petugas Otoritas Indonesia untuk mengatur dan menetapkan standar keselamatan yang lebih tinggi pada sektor maritim sangatlah penting. Untuk itu, Indonesia memiliki semangat positif melanjutkan kerja sama yang telah terjalin erat antara Ditjen Perhubungan Laut dan *Australian Maritime Safety Authority* (AMSA) untuk di tahun-tahun mendatang.

“Salah satu program kerjasama Indonesia dengan Australia adalah pelaksanaan Pertemuan Indonesia – Australia Transport Sector Forum (TSF) 5-6 April 2017 di Nusa Dua, Bali,” kata Tonny.

Pada pertemuan itu dibahas juga ajakan Australia untuk membentuk suatu kerangka kerjasama bidang kesiapsiagaan dan penanggulangan pencemaran minyak dari Kapal maupun alat lainnya, yang mengikutsertakan Timor Leste dan Papua Nugini.

Prakarsa Australia tersebut tertuang dalam *Draft Memorandum of Understanding on Regional Marine Pollution and Preparedness and Responses between Australia and Indonesia* beserta *Terms of Reference* dan *Concept Note*-nya. ● *Mayan*

PENINGKATAN FASILITAS TRANSPORTASI WILAYAH BIMP EAGA CIPTAKAN EFISIENSI LOGISTIK



Peningkatan fasilitas transportasi di wilayah The Brunei Darussalam-Indonesia-Malaysia-Philippines East ASEAN Growth Area (BIMP-EAGA) diyakini dapat menciptakan efisiensi logistik dan sistem transportasi multimoda.

“Dengan begitu maka dapat memudahkan perpindahan arus barang dan menghubungkan transportasi darat, laut, dan udara,” kata Dirjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan A. Tonny Budiono dalam sambutan pada Pertemuan BIMP-EAGA *Sea Linkages Working Group* di Manado, Rabu (19/4/2017).

Jaringan transportasi yang efisien, aman dan terintegrasi di wilayah BIMP EAGA menjadi hal yang vital mewujudkan potensi ekonomi daerah, juga untuk meningkatkan pariwisata dan investasi daerah.

Hal ini sesuai dengan arahan para Menteri Transportasi BIMP EAGA untuk mendukung *Sea Linkages Working Group* (SLWG) guna meningkatkan kerja sama yang saling menguntungkan sehingga negara-negara BIMP EAGA dapat berkontribusi pada pengembangan sosial ekonomi di wilayah BIMP EAGA maupun daerah sekitarnya.

Para Menteri BIMP EAGA menekankan SLWG untuk tetap melanjutkan kegiatan-kegiatan dalam rangka peningkatan konektivitas laut di antara wilayah kepulauan di BIMP EAGA untuk mendukung rute pelayaran yang efisien dan berkelanjutan termasuk dalam mendukung pelayaran Ro-Ro dan cruise.

“Salah satu pembahasan pertemuan di Manado adalah persiapan pelayaran perdana kapal Ro-Ro dari Davao ke Bitung pada akhir April

2017 bersamaan dengan KTT ASEAN yang diselenggarakan di Manila, Filipina.

Kegiatan tersebut juga akan memberikan kontribusi kepada kawasan sub regional BIMP-EAGA melalui upaya-upaya kerja sama yang berkelanjutan dalam meningkatkan konektivitas di wilayah BIMP EAGA.

“Diharapkan juga akan mampu meningkatkan ekonomi di kawasan timur Indonesia,” tuturnya.

Seperti diketahui, Indonesia memiliki laut yang berbatasan langsung dengan 10 negara tetangga. Mereka adalah India, Thailand, Vietnam, Malaysia, Singapura, Filipina, Republik Palau, Papua New Guinea, Australia, dan Timor Leste.

Wilayah BIMP EAGA memiliki perbatasan laut dengan Indonesia, dan hal ini perlu mendapat perhatian serius. ● Presti



TANJUNG EMAS SIAP TERAPKAN *INAPORTNET*

Tidak lama lagi Direktorat Jenderal Perhubungan Laut akan menerapkan aplikasi Inaportnet di Pelabuhan Tanjung Emas, Semarang, Jawa Tengah. Langkah ke arah sana sudah semakin dekat karena hanya tinggal menunggu SDM yang saat ini masih mengikuti training. Perapan aplikasi inaportnet ini untuk meningkatkan pelayanan kapal dan barang.

Sebagai bentuk kesiapan, Kepala Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas I Pelabuhan Tanjung Emas, Semarang, Jawa Tengah, Capt. Gadjah Rooseno membacakan pakta integritas yang berlangsung di Ruang Sriwijaya, Kementerian Perhubungan, Jakarta, Akhir April lalu.

Selain membaca, Gadjah Rooseno juga menandatangani pakta integritas tersebut yang disaksikan langsung oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut Ir. A Tonny Budiono, MM. Turut hadir pada kesempatan tersebut Sekretaris Ditjen Hubla Ir.

Nyoman Sukayadnya, Direktur Ke-
pelabuhanan Mauritz H. Sibarani,
dan stakeholder terkait.

“Penerapan Inaportnet di Pelabuhan ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kapal dan barang di pelabuhan agar dapat berjalan cepat, valid, transparan serta biaya yang minimal sehingga dapat meningkatkan daya saing pelabuhan di Indonesia,” ujar Tonny dalam sambutannya.

Menurut Dirjen Hubla, penerapan inaportnet ini juga telah menjadi *quick win* Menteri Perhubungan yang harus diterapkan di 16 Pelabuhan di Indonesia. Pelabuhan tersebut adalah Pelabuhan Makassar, Pelabuhan Belawan, Pelabuhan Tanjung Perak, Pelabuhan Tanjung Priok, Pelabuhan Bitung, Pelabuhan Balikpapan, Pelabuhan Ambon, Pelabuhan Tanjung Emas, Pelabuhan Banjarmasin, Pelabuhan Dumai, Pelabuhan Banten, Pelabuhan Panjang, Pelabuhan Manggar, Pelabuhan Tanjung Uban, Pelabuhan

Batam dan Pelabuhan Sorong.

Dari sejumlah pelabuhan pelabuhan dimaksud, saat ini Sistem *Inaportnet* telah dilaksanakan pada 4 pelabuhan utama yaitu Pelabuhan Makassar sejak tanggal 01 Juni 2016, Pelabuhan Belawan sejak tanggal 01 Juli 2016, Pelabuhan Tanjung Perak sejak tanggal 02 November 2016 dan Pelabuhan Tanjung Priok tanggal 11 November 2016.

Lebih jauh Dirjen Hubla mengatakan, bahwa penerapan *Inaportnet* di pelabuhan harus didukung oleh beberapa sistem yaitu Sistem Informasi Lalu Lintas dan Angkutan Laut (SIMLALA), Sistem Kapal On Line, Aplikasi Sertifikasi Pelaut, Sistem Informasi Kepelabuhanan dan sistem yang ada pada Badan Usaha Pelabuhan (BUP). *Inaportnet* dapat berjalan apabila sistem pendukungnya dapat terintegrasi dengan baik, sehingga seluruh system harus dibangun dan dikembangkan secara sinergi dengan melibatkan seluruh pemangku kepeningangan (*stakeholders*). • Silo

DITJEN HUBLA DELEGASIKAN KEWENANGAN STATUTORIA 14 KAPAL KE PT BKI

Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan dengan PT. Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) atau PT. BKI melakukan penandatanganan perjanjian kerjasama (*Cooperation Agreement*) tentang penyerahan kewenangan untuk melaksanakan survei dan sertifikasi statutoria terhadap 14 kapal berbendera Indonesia.

Penandatanganan dilakukan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut, A. Tonny Budiono mewakili Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan dan Direktur Utama PT. Biro Klasifikasi Indonesia (Persero), Rudiyanto, mewakili PT. Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) di Jakarta, Rabu (5/4/2016).

Dalam sambutannya Dirjen Hubla menyebutkan bahwa tujuan dilakukannya Perjanjian Kerjasama ini adalah pendelegasian kewenangan full authorization untuk 14 Kapal berbendera Indonesia dari pemerintah dalam hal ini Kementerian Perhubungan kepada PT. BKI yang merupakan Badan Klasifikasi milik Indonesia dan Perusahaan BUMN yang bergerak di Bidang Jasa Pemastian, Jasa Survei dan Sertifikasi.

Adapun PT. BKI melaksanakan pekerjaan terkait dengan persetujuan, survey dan sertifikasi statutoria kapal berbendera Indonesia, dengan menjelaskan ruang lingkup, jangka waktu, ketentuan dan persyaratan-persyaratan sesuai standar Badan Klasifikasi, yang sebelumnya telah diberikan kewenangan secara partial authorization kepada PT. BKI.

“Kerjasama ini bersifat cukup strategis bagi dunia pelayaran di Indonesia, khususnya dalam rangka meningkatkan jaminan keselamatan pelayaran nasional, sebagai bagian dukungan terhadap Program



Nawacita Nasional Perwujudan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia,” tegas Dirjen Tonny Budiono.

PT BKI mengaku siap melaksanakan kewenangan statutoria yang didelegasi oleh Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.

“BKl sebagai Badan Klasifikasi Nasional yang merupakan salah satu komponen bangsa yang bergerak di sektor maritim, siap mendukung pemerintah menjalankan kewenangan dengan penuh tanggung ja-

wab sesuai dengan tupoksi yang diberikan,” kata Direktur Utama PT BKl Rudiyanto.

Rudiyanto mengatakan, BKl selalu mendukung Kementerian Perhubungan, Cq Ditjen Hubla untuk selalu bersinergi memberikan kontribusi positif agar Nawacita Nasional, Indonesia sebagai poros maritim dunia kian menguat dan terwujud melalui sinergi yang terjadi di berbagai bidang sektor kemaritiman, termasuk kepercayaan atas pemberian kewenangan statutoria tersebut. • Silo

VTS SORONG DAN DUMAI SIAP TERAPKAN PNBP

Pelayanan jasa *Vessel Traffic Service* (VTS) Sub Center Dumai, Kepulauan Riau dan Sorong, Papua Barat, telah siap menerapkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Bila tidak ada aral melintang, pemberlakuan tersebut akan mulai pada Mei 2017.

Pemberlakuan PNBPN atas jasa dua VTS tersebut telah disosialisasikan masing-masing pada 30 Maret dan 21 April 2017.

Dirjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan A. Tonny Budiono mengingatkan, agar petugas VTS melayani kapal secara optimal.

“VTS harus dapat memberikan layanan secara optimal kepada kapal-kapal yang masuk menuju maupun keluar pelabuhan di wilayah kerjanya,” ujar Tonny.

Sedangkan kepada seluruh perusahaan pelayaran, diharapkan turut berpartisipasi sesuai dengan apa yang dituangkan pada *Standard Operational Procedure* (SOP).

Kegiatan sosialisasi penerapan PNBPN VTS di Sorong dibuka oleh Kepala Bidang Status Hukum dan Sertifikasi Kapal Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas I Sorong, Agustinus, ST, MT. Sedangkan sosialisasi VTS di Dumai dilakukan oleh Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan kelas I Dumai Capt. Sudiono. Keduanya mewakili Dirjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan A Tonny Budiono.

Kepala Seksi Peralatan, Sub Direktorat Telekomunikasi Pelayaran Direktorat Kenavigasian, Erika Marpaung, ST, M.MTr., yang memberikan materi kepada para peserta sosialisasi mengatakan bahwa pemberlakuan PNBPN Jasa Kenavigasian



VTS Sorong sesuai dengan dengan PP No 15 Tahun 2016 Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak di Lingkungan Kementerian Perhubungan Dan Pelaksanaan Penarikan Pnbp Tersebut Mengacu Pada Peraturan Dirjen Hubla Nomor: Hk.103/2/14/Djpl-16 Tahun 2016.

“Pemberian layanan jasa kenavigasian VTS diikuti dengan penarikan jasa PNBPN guna peningkatan keandalan operasional VTS seperti yang sudah diberlakukan pada beberapa pelabuhan yang memiliki

VTS,” ungkap Erika.

Beberapa pelabuhan yang telah memiliki fasilitas VTS itu antara lain Pelabuhan Panjang, Pelabuhan Teluk Bayur, Pelabuhan Batam, Pelabuhan Belawan, Makassar, Samarinda, Balikpapan, Palembang, Tanjung Priok, Merak, Tanjung Emas Semarang, Bitung, Tanjung Perak Surabaya, Banjarmasin, Bena, dan Pelabuhan Lembar.

“Diharapkan sosialisasi ini dapat meningkatkan penguasaan dalam pelaksanaan penerapan PNBPN di Dumai,” katanya. • Presti